T I P S
Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial
Vol. 4 – No. 2 2026 | ESSN 3046-7381
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tips

Masyarakat Sebagai Sistem Sosial

Agus Salim Lubis[1], Wahidatu Sifa[2], Paridah[3], Miranda Karo Sekali[4], Jufriana[5], Mita Dayanti[6]

[1,2,3,4,5,6]UPT SPF SD Negeri 104231 Sugiharjo, Indonesia

Email: agoesloebis86@gmail.com[1], wahidatusifa83@guru.sd.belajar.id[2], paridah13@guru.sd.belajar.id[3], mirandakarosekali62@guru.sd.belajar.id[4], jufriana16@guru.sd.belajar.id[5], mita719@guru.sd.belajar.id[6]

ABSTRAK

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terbentuk melalui hubungan timbal balik antara individu, kelompok, nilai, norma, lembaga, struktur, dan kebudayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis masyarakat sebagai sistem sosial melalui perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer, mengidentifikasi unsur-unsur pembentuknya, serta menjelaskan mekanisme integrasi dan dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya-karya teoretis Émile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, dan Niklas Luhmann, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang dinamis, ditandai oleh keterkaitan antarkomponen, pembagian fungsi, interaksi, komunikasi, serta mekanisme integrasi dan adaptasi. Teori Durkheim menjelaskan peran fakta sosial dan solidaritas, Weber menekankan makna tindakan individu, Parsons menguraikan fungsi dan keterkaitan antarkomponen sistem, sedangkan Luhmann menempatkan komunikasi dan diferensiasi sebagai dasar reproduksi sistem sosial. Dinamika masyarakat kontemporer memperlihatkan bahwa modernisasi, globalisasi, dan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan berupa individualisme, polarisasi, disinformasi, dan ketimpangan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa keberlanjutan sistem sosial bergantung pada kemampuan masyarakat membangun integrasi, kepercayaan, solidaritas, dan keadilan sosial sekaligus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Kata kunci: masyarakat; sistem sosial; interaksi sosial; integrasi sosial; perubahan sosial.

ABSTRACT

Society is a social system formed through reciprocal relationships among individuals, groups, values, norms, institutions, structures, and culture. This study aims to analyze society as a social system through the perspectives of classical and contemporary sociological theories, identify its constituent elements, and explain the mechanisms of integration and the dynamics of change within social life. The study employs a qualitative approach, specifically through library research. Data were gathered from the theoretical works of Émile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons, and Niklas Luhmann, as well as relevant scholarly journal articles. Data collection was conducted via documentation, while analysis was performed using content analysis and thematic analysis. The findings indicate that society is a dynamic social system characterized by interconnections among components, the division of functions, interaction, communication, and mechanisms for integration and adaptation. Durkheim's theory highlights the role of social facts and solidarity; Weber emphasizes the meaning behind individual actions; Parsons outlines the functions and interrelationships among system components; and Luhmann posits communication and differentiation as the foundations for the reproduction of a social system. The

dynamics of contemporary society reveal that modernization, globalization, and digital technology bring both opportunities and challenges such as individualism, polarization, disinformation, and social inequality. This study asserts that the sustainability of a social system depends on a society's capacity to foster integration, trust, solidarity, and social justice, while simultaneously adapting to changes in its environment.
Keywords: society; social system; social interaction; social integration; social change.

PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan salah satu objek kajian utama dalam ilmu sosiologi karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membangun kehidupan bersama melalui hubungan antarindividu, kelompok, lembaga, nilai, norma, dan kebudayaan. Berbagai unsur tersebut saling berhubungan dan membentuk pola kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah, tetapi juga sebagai kesatuan sosial yang terbentuk melalui interaksi, hubungan timbal balik, pembagian peran, serta kesepakatan terhadap nilai dan norma. Hubungan antarkomponen tersebut menjadikan masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang setiap unsurnya saling memengaruhi dan mendukung keberlangsungan kehidupan bersama.

Pemahaman masyarakat sebagai sistem sosial dapat ditemukan dalam pemikiran para tokoh sosiologi klasik. Durkheim (1982) menjelaskan bahwa fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu serta memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilakunya. Artinya, tindakan individu tidak terlepas dari aturan, nilai, kebiasaan, dan lembaga yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, Weber (1978) menekankan pentingnya tindakan sosial, yaitu tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk melalui hubungan antara individu dan struktur sosial. Struktur sosial memengaruhi tindakan individu, sedangkan tindakan individu dapat mempertahankan, mengembangkan, bahkan mengubah struktur masyarakat.

Pemikiran mengenai masyarakat sebagai sistem sosial kemudian dikembangkan melalui pendekatan struktural fungsional. Parsons (1951) memandang sistem sosial sebagai hubungan interaksi antaraktor yang berlangsung dalam situasi tertentu dan diatur oleh nilai serta simbol budaya yang disepakati bersama. Dalam pandangan ini, masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing. Keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan pemerintahan merupakan contoh lembaga sosial yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Keteraturan sosial terbentuk melalui nilai, norma, pembagian peran, dan pengendalian sosial. Namun, kehidupan masyarakat tidak selalu berjalan harmonis karena perbedaan kepentingan, ketimpangan kekuasaan, dan konflik antarkelompok juga menjadi bagian dari dinamika sosial.

Sebagai suatu sistem, masyarakat memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Individu berperan sebagai pelaku tindakan sosial, sedangkan kelompok menjadi tempat terbentuknya hubungan, solidaritas, dan identitas bersama. Nilai dan norma berfungsi sebagai pedoman perilaku, sementara status dan peran mengatur kedudukan serta tanggung jawab setiap individu. Lembaga sosial menyediakan pola hubungan yang relatif tetap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun struktur sosial menggambarkan hubungan berdasarkan perbedaan kedudukan, kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan. Seluruh komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena perubahan pada satu unsur dapat

memengaruhi unsur lainnya. Misalnya, perubahan ekonomi dapat berdampak pada kehidupan keluarga, pendidikan, mobilitas sosial, dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sistem sosial membantu menjelaskan hubungan antarkomponen dalam kehidupan masyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada integrasi, solidaritas, kepercayaan, dan kesadaran bersama. Integrasi sosial memungkinkan individu dan kelompok yang memiliki latar belakang serta kepentingan berbeda untuk tetap hidup berdampingan. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah kohesi sosial, yaitu keterhubungan antaranggota masyarakat. MacIsaac et al. (2023) menjelaskan bahwa kohesi sosial memiliki beberapa dimensi, antara lain hubungan sosial, solidaritas, dan kepercayaan di dalam maupun antarkomunitas serta organisasi. Sementara itu, Aruqaj (2023) menekankan bahwa kohesi sosial perlu dipahami secara menyeluruh karena berkaitan dengan ketimpangan, kualitas institusi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur dan aturan, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang ada.

Perkembangan masyarakat modern membuat hubungan antarsistem sosial semakin kompleks. Berbagai lembaga memiliki fungsi, tujuan, dan cara kerja yang semakin khusus. Luhmann (1995) memandang masyarakat bukan sekadar kumpulan individu atau organisasi, melainkan sebagai sistem komunikasi yang terus berlangsung dan membentuk kehidupan sosial. Pandangan ini memperluas pemahaman tentang sistem sosial karena komunikasi tidak hanya menjadi sarana hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan dan mengembangkan masyarakat. Guedes dan Vinhas (2021) menjelaskan bahwa teori sistem Luhmann memberikan perhatian terhadap hubungan antara kompleksitas masyarakat kontemporer, proses kognisi, dan pembentukan pengetahuan. Perspektif ini membantu menjelaskan kemampuan masyarakat modern dalam membentuk berbagai subsistem sekaligus menghadapi tantangan kompleksitas kehidupan sosial.

Kompleksitas tersebut semakin terlihat melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, membentuk opini, memperoleh informasi, dan menjalin hubungan antarkelompok. Media sosial memungkinkan individu membangun jaringan tanpa dibatasi jarak geografis. Namun, meningkatnya hubungan digital tidak selalu menghasilkan integrasi sosial. González-Bailón dan Lelkes (2023) menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak yang beragam terhadap kohesi sosial. Di satu sisi, media sosial dapat memperluas jaringan, pertukaran informasi, modal sosial, dan perilaku saling membantu. Di sisi lain, media sosial juga dapat mendorong polarisasi, konflik, perilaku tidak santun, dan penyebaran informasi yang keliru. Dengan demikian, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam sistem sosial.

Perubahan masyarakat digital juga dapat dijelaskan melalui konsep diferensiasi sosial dalam teori sistem Luhmann. Masyarakat modern memiliki berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan media, yang masing-masing memiliki cara kerja dan orientasi tersendiri. Taekke (2022) membahas diferensiasi masyarakat melalui perspektif Luhmann dengan memperhatikan pengaruh media digital dan kemungkinan munculnya diferensiasi algoritmik. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga dapat mengubah cara masyarakat mengatur komunikasi, memperoleh informasi, dan membangun hubungan sosial. Selanjutnya, van Kempen

dan Feldpausch-Parker (2024) menunjukkan bahwa teori sistem sosial dapat digunakan untuk menganalisis komunikasi dalam persoalan lingkungan yang kompleks. Perbedaan pandangan antara sistem ilmu pengetahuan, politik, media, dan masyarakat dapat menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan. Akibatnya, penyampaian informasi belum tentu menghasilkan kesepahaman atau tindakan bersama. Oleh karena itu, masyarakat perlu dipahami sebagai sistem yang terus berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya.

Meskipun teori sistem sosial telah berkembang melalui pemikiran Parsons dan Luhmann, masih terdapat persoalan dalam memahami masyarakat secara menyeluruh. Kajian sosiologi terkadang lebih menekankan salah satu aspek, seperti struktur, fungsi lembaga, tindakan individu, atau komunikasi sosial. Pendekatan struktural fungsional menjelaskan keteraturan dan fungsi lembaga dalam masyarakat, tetapi dapat kurang memperhatikan konflik, ketimpangan, dan perubahan kekuasaan apabila digunakan secara terlalu statis. Sebaliknya, teori tindakan sosial membantu memahami makna tindakan individu, tetapi perlu dihubungkan dengan struktur dan lembaga sosial yang lebih luas. Sementara itu, teori sistem Luhmann menjelaskan kompleksitas, diferensiasi, dan komunikasi, tetapi konsepnya perlu dikaitkan dengan kondisi sosial konkret agar lebih mudah diterapkan dalam analisis masyarakat.

Persoalan lainnya adalah tidak selalu sejalan antara keteraturan sosial, kekuatan lembaga, dan kohesi masyarakat. Lembaga yang stabil belum tentu mampu membangun kepercayaan antarkelompok. Demikian pula, meningkatnya hubungan melalui media digital belum tentu memperkuat solidaritas sosial. Aruqaj (2023) menunjukkan pentingnya hubungan antara ketimpangan, kualitas institusi, kesejahteraan, dan keterhubungan sosial dalam memahami kohesi masyarakat. MacIsaac et al. (2023) juga menekankan bahwa kohesi sosial mencakup hubungan sosial, solidaritas, dan kepercayaan. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial perlu dipahami tidak hanya melalui struktur dan keberadaan lembaga, tetapi juga melalui kualitas hubungan antaranggota masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan kajian yang menghubungkan berbagai perspektif teori sosiologi dalam menjelaskan masyarakat sebagai sistem sosial. Pembahasan tidak cukup hanya melihat masyarakat sebagai kumpulan lembaga yang memiliki fungsi masing-masing, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan antara tindakan individu, nilai dan norma, kelompok sosial, komunikasi, serta perubahan lingkungan. Perkembangan teknologi digital juga menuntut pemahaman yang lebih luas mengenai integrasi, diferensiasi, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, artikel ini menyusun sintesis pemikiran sosiologi klasik dan kontemporer untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masyarakat sebagai sistem sosial yang terus berkembang.

Artikel ini bertujuan menganalisis masyarakat sebagai sistem sosial melalui perspektif teori sosiologi klasik dan kontemporer, mengidentifikasi unsur-unsur pembentuknya, serta menjelaskan hubungan antarkomponen, mekanisme integrasi, dan perubahan sosial. Pembahasan secara khusus mencakup teori struktural fungsional Parsons, teori fakta sosial Durkheim, teori tindakan sosial Weber, dan teori sistem sosial Luhmann. Selain itu, artikel ini mengaitkan berbagai perspektif tersebut dengan perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi, ketimpangan sosial, dan kohesi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai masyarakat sebagai sistem yang unsur-unsurnya saling bergantung, terus berkembang, dan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) untuk menganalisis masyarakat sebagai sistem sosial melalui kajian konsep, teori, dan hasil penelitian sosiologi. Pendekatan ini bertujuan memahami hubungan antarkomponen sosial, mekanisme keteraturan dan integrasi, serta dinamika perubahan masyarakat. Literatur digunakan sebagai sumber utama untuk membandingkan dan menginterpretasikan berbagai perspektif teoretis dalam menjelaskan masyarakat sebagai suatu sistem sosial.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa karya teoretis Durkheim tentang fakta sosial, Weber tentang tindakan sosial, Parsons tentang sistem sosial dan struktural fungsional, serta Luhmann tentang sistem sosial dan komunikasi. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas struktur, interaksi, nilai, norma, integrasi, kohesi, diferensiasi, dan perubahan sosial. Literatur terbitan 2021–2026 diprioritaskan untuk memperoleh perspektif kontemporer, sedangkan karya klasik digunakan sebagai landasan teoretis.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan meliputi masyarakat sebagai sistem sosial, social system, social systems theory, structural functionalism, social integration, social cohesion, social structure, social interaction, social differentiation, dan digital society. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan identitas publikasi, serta keterkaitan konsep dan temuan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber yang tidak relevan atau tidak memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi tidak digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi dari literatur terpilih. Setiap sumber diperiksa berdasarkan judul, penulis, tahun penerbitan, dan kesesuaian substansinya. Informasi yang diperoleh kemudian disusun dalam matriks berdasarkan identitas referensi, fokus kajian, perspektif teori, konsep utama, dan kontribusinya terhadap penelitian. Teknik ini membantu membandingkan berbagai sumber serta memastikan interpretasi tetap memperhatikan konteks akademik setiap dokumen (Morgan, 2022).

Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, memberikan kode, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi berdasarkan kategori konsep masyarakat, unsur pembentuk sistem sosial, hubungan struktural dan fungsional, integrasi, serta perubahan sosial. Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk menemukan pola hubungan antarkonsep melalui tahapan membaca literatur, pemberian kode, pembentukan tema, peninjauan tema, dan penyusunan interpretasi. Kualitas analisis diperhatikan melalui kesesuaian antara fokus penelitian, proses pengembangan tema, dan interpretasi hasil kajian (Braun & Clarke, 2022). Penggunaan kedua teknik tersebut juga mendukung pengorganisasian dan interpretasi data kualitatif secara sistematis (Busetto et al., 2022).

Hasil analisis selanjutnya disintesiskan melalui perbandingan perspektif Durkheim, Weber, Parsons, dan Luhmann. Pemikiran Durkheim digunakan untuk menjelaskan fakta sosial dan solidaritas, Weber untuk memahami tindakan sosial, Parsons untuk menganalisis fungsi dan keterkaitan antarkomponen masyarakat, serta Luhmann untuk mengkaji komunikasi, kompleksitas, dan diferensiasi sistem sosial. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan persamaan, perbedaan, kontribusi,

dan keterbatasan masing-masing teori. Untuk menjaga kualitas penelitian, interpretasi diperiksa melalui perbandingan antarsumber, konsistensi konsep, dan kesesuaian argumentasi dengan landasan teoretis. Prinsip transparansi prosedur dan konsistensi analisis menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas penelitian kualitatif (Yadav, 2022; Braun & Clarke, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Masyarakat sebagai Sistem Sosial

Masyarakat merupakan suatu kesatuan kehidupan bersama yang terbentuk melalui hubungan dan interaksi sosial ant individu maupun kelompok dalam lingkungan tertentu. Dalam perspektif sosiologi, masyarakat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah, tetapi sebagai struktur hubungan sosial yang memiliki pola interaksi, nilai, norma, lembaga, dan kebudayaan yang mengatur kehidupan bersama. Durkheim (1982) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki realitas sosial yang berada di luar individu dan memengaruhi perilaku anggotanya melalui fakta sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dibangun oleh aturan, kebiasaan, dan nilai kolektif yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalankan aktivitas sosial. Sementara itu, Weber (1978) memandang masyarakat melalui tindakan sosial yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada individu lain. Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat terbentuk melalui hubungan antara individu sebagai pelaku sosial dan struktur sosial sebagai kerangka yang mengatur kehidupan bersama.

Konsep sistem sosial merujuk pada suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan memengaruhi dalam menjalankan fungsi tertentu. Parsons (1951) menjelaskan bahwa sistem sosial terbentuk melalui interaksi antara aktor-aktor yang berada dalam situasi tertentu dan diatur oleh sistem simbol budaya yang dianut bersama. Berdasarkan pandangan tersebut, masyarakat dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki keteraturan karena setiap unsur menjalankan fungsi dan berhubungan dengan unsur lainnya. Keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan pemerintahan merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki peran berbeda, tetapi saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lainnya. Perubahan dalam sistem ekonomi, misalnya, dapat berdampak pada pola pekerjaan, hubungan keluarga, pendidikan, dan stratifikasi sosial.

Masyarakat sebagai sistem sosial memiliki karakteristik berupa keterhubungan antarkomponen, keteraturan, ketergantungan, keberlanjutan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Keterhubungan menunjukkan bahwa individu, kelompok, dan lembaga sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dalam hubungan timbal balik. Keteraturan terbentuk melalui nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku, sedangkan ketergantungan terlihat dari fungsi masing-masing unsur dalam mempertahankan kehidupan bersama. Sistem sosial juga memiliki kemampuan mempertahankan keberlangsungannya melalui proses sosialisasi, pengendalian sosial, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Namun, keteraturan tersebut tidak berarti masyarakat selalu berada dalam keadaan harmonis. Perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, dan ketimpangan sumber daya dapat menimbulkan konflik yang memengaruhi keseimbangan sistem sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu dipahami sebagai sistem yang dinamis, bukan sebagai susunan hubungan yang bersifat tetap.

Hubungan individu dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Individu memperoleh identitas, nilai, pengetahuan, dan pola

perilaku melalui proses kehidupan sosial, sedangkan masyarakat terbentuk dan berkembang melalui tindakan individu yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam perspektif Weber (1978), tindakan individu menjadi bermakna secara sosiologis ketika diarahkan kepada orang lain dan mempertimbangkan tindakan pihak lain. Sementara itu, Durkheim (1982) menekankan bahwa individu berada dalam lingkungan sosial yang memiliki aturan dan kekuatan kolektif. Kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa individu tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh masyarakat, tetapi juga bukan sekadar penerima pasif aturan sosial. Individu memiliki kemampuan menafsirkan, menerima, menolak, dan mengubah pola hubungan yang telah terbentuk. Hubungan timbal balik tersebut menjadikan masyarakat sebagai hasil interaksi antara tindakan manusia dan struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan bersama.

Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya sistem sosial karena melalui interaksi individu membangun hubungan, mengembangkan pola komunikasi, membentuk kelompok, dan menghasilkan kesepakatan mengenai nilai serta norma. Interaksi yang berlangsung secara berulang dapat membentuk pola hubungan yang relatif stabil dan berkembang menjadi institusi sosial. Luhmann (1995) menjelaskan bahwa sistem sosial direproduksi melalui komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Artinya, keberadaan sistem sosial tidak hanya bergantung pada kehadiran individu secara fisik, tetapi juga pada berlangsungnya komunikasi yang memungkinkan hubungan sosial terus terbentuk. Dalam masyarakat kontemporer, komunikasi tersebut berlangsung melalui interaksi langsung maupun media digital. Dengan demikian, masyarakat sebagai sistem sosial terbentuk melalui hubungan yang terus berkembang antara individu, kelompok, struktur, dan komunikasi yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan bersama.

2. Unsur-Unsur Pembentuk Sistem Sosial

Masyarakat sebagai sistem sosial dibentuk oleh sejumlah unsur yang memiliki fungsi dan hubungan saling memengaruhi. Unsur-unsur tersebut mencakup individu, kelompok sosial, nilai, norma, status, peran, lembaga, organisasi, struktur, stratifikasi, dan kebudayaan. Setiap unsur memberikan kontribusi terhadap pembentukan pola kehidupan masyarakat. Parsons (1951) menjelaskan bahwa keteraturan sistem sosial bergantung pada hubungan antara aktor, norma, dan nilai yang memberikan arah terhadap tindakan sosial. Sementara itu, Durkheim (1982) menegaskan bahwa keberadaan aturan dan kesadaran kolektif menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan kehidupan bersama. Oleh karena itu, unsur-unsur pembentuk sistem sosial perlu dipahami sebagai komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dianalisis secara terpisah.

Individu merupakan unsur dasar dalam kehidupan masyarakat karena setiap hubungan sosial melibatkan tindakan manusia sebagai pelaku sosial. Individu memiliki kebutuhan, kepentingan, identitas, dan kemampuan yang memengaruhi pola interaksi dengan orang lain. Namun, kehidupan individu tidak berlangsung secara terisolasi karena manusia membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh perlindungan, membangun identitas, dan mencapai tujuan bersama. Kelompok sosial dapat terbentuk berdasarkan hubungan keluarga, pekerjaan, pendidikan, agama, kesamaan kepentingan, maupun kedekatan geografis. Hubungan dalam kelompok tersebut memungkinkan terbentuknya solidaritas, kerja sama, dan pembagian tanggung jawab. Dalam konteks sistem sosial, individu dan kelompok merupakan unsur yang saling melengkapi karena tindakan individu membentuk

hubungan kelompok, sedangkan kelompok memberikan pengaruh terhadap identitas dan perilaku anggotanya.

Nilai dan norma sosial berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat. Nilai sosial berkaitan dengan keyakinan kolektif mengenai sesuatu yang dianggap baik, penting, dan diharapkan, sedangkan norma sosial merupakan aturan yang mengatur tindakan individu dalam kehidupan bersama. Nilai memberikan orientasi umum terhadap perilaku, sementara norma menjelaskan batasan mengenai tindakan yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial. Parsons (1951) menempatkan nilai bersama sebagai salah satu unsur penting dalam membangun integrasi sistem sosial karena nilai memberikan orientasi yang relatif sama bagi para pelaku sosial. Sementara itu, Durkheim (1982) menjelaskan bahwa aturan sosial memiliki kekuatan mengikat yang dapat mengarahkan dan membatasi tindakan individu. Dengan demikian, keberadaan nilai dan norma memungkinkan masyarakat membangun keteraturan, mengurangi ketidakpastian dalam interaksi, serta mempertahankan keberlangsungan hubungan sosial.

Status dan peran sosial merupakan unsur yang mengatur posisi dan tanggung jawab individu dalam struktur masyarakat. Status menunjukkan kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial, sedangkan peran berkaitan dengan seperangkat perilaku dan kewajiban yang diharapkan sesuai dengan kedudukan tersebut. Seseorang dapat memiliki beberapa status sekaligus, seperti sebagai anggota keluarga, pekerja, pendidik, pemimpin, atau anggota organisasi. Setiap status membawa konsekuensi berupa peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam perspektif Parsons (1951), hubungan antara aktor dan harapan normatif menjadi bagian penting dalam membangun keteraturan sistem sosial. Pembagian status dan peran memungkinkan berlangsungnya koordinasi dalam kehidupan bersama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik peran apabila seseorang menghadapi tuntutan yang berbeda dari berbagai lingkungan sosial.

Lembaga dan organisasi sosial merupakan bentuk hubungan yang lebih terstruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga sosial menyediakan aturan, nilai, dan pola hubungan yang relatif stabil, sedangkan organisasi sosial merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan, struktur, dan pembagian tugas tertentu. Keluarga berperan dalam reproduksi sosial dan sosialisasi, lembaga pendidikan menjalankan fungsi pembelajaran dan pewarisan pengetahuan, lembaga ekonomi mengatur produksi serta distribusi sumber daya, lembaga agama memberikan orientasi moral dan spiritual, sedangkan lembaga politik mengatur kekuasaan dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam perspektif struktural fungsional, keberadaan lembaga tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi yang mendukung keberlangsungan masyarakat (Parsons, 1951). Meskipun demikian, fungsi lembaga sosial tidak selalu menghasilkan keteraturan secara merata karena setiap lembaga juga dapat menjadi ruang berlangsungnya persaingan kepentingan dan ketimpangan kekuasaan.

Struktur dan stratifikasi sosial memperlihatkan pola hubungan serta perbedaan posisi individu dan kelompok dalam masyarakat. Struktur sosial mencakup susunan hubungan yang relatif teratur berdasarkan status, peran, kelompok, dan institusi, sedangkan stratifikasi sosial menunjukkan pelapisan masyarakat berdasarkan penguasaan sumber daya, kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan prestise. Perbedaan posisi tersebut dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan partisipasi sosial. Dalam perspektif sistem sosial, struktur memungkinkan pembagian tugas dan koordinasi, tetapi stratifikasi yang terlalu timpang dapat menghambat integrasi karena

menghasilkan perbedaan kesempatan dan pengalaman sosial. Oleh karena itu, analisis masyarakat sebagai sistem sosial tidak cukup hanya menjelaskan bagaimana struktur terbentuk, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana distribusi sumber daya dan kekuasaan memengaruhi hubungan antarkelompok.

Kebudayaan menjadi orientasi kehidupan masyarakat karena mengandung sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, simbol, bahasa, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan melalui proses sosial. Kebudayaan memberikan identitas kolektif sekaligus menjadi pedoman bagi individu dalam memahami lingkungan dan menjalankan kehidupan bersama. Dalam pemikiran Parsons (1951), sistem budaya memiliki hubungan erat dengan sistem sosial karena nilai dan simbol budaya memberikan orientasi terhadap tindakan para aktor. Kebudayaan juga mengalami perubahan melalui interaksi antarkelompok, perkembangan pendidikan, mobilitas penduduk, globalisasi, dan penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, kebudayaan tidak hanya berfungsi mempertahankan kesinambungan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya negosiasi dan perubahan nilai. Hubungan antara kebudayaan dan sistem sosial memperlihatkan bahwa keberlangsungan masyarakat bergantung pada kemampuan mempertahankan identitas bersama sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan.

3. Perspektif Teori dalam Memahami Masyarakat sebagai Sistem Sosial

Pemahaman masyarakat sebagai sistem sosial dapat dikembangkan melalui beberapa perspektif teori sosiologi yang menjelaskan hubungan antara individu, struktur, fungsi, tindakan, dan komunikasi. Teori struktural fungsional Talcott Parsons, teori sistem sosial Niklas Luhmann, teori fakta sosial Émile Durkheim, dan teori tindakan sosial Max Weber memberikan landasan konseptual yang berbeda dalam memahami terbentuknya keteraturan dan dinamika masyarakat. Meskipun memiliki titik tekan yang berbeda, keempat perspektif tersebut dapat digunakan secara komplementer untuk menjelaskan masyarakat sebagai kesatuan sosial yang memiliki struktur, mekanisme integrasi, dan kemampuan mengalami perubahan.

a. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Parsons (1951) memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas sejumlah bagian yang saling berhubungan dan menjalankan fungsi tertentu untuk mempertahankan keberlangsungan sistem. Setiap bagian masyarakat, seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik, memiliki fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan bersama. Dalam perspektif ini, keteraturan sosial dibangun melalui kesepakatan nilai, norma, pembagian peran, dan mekanisme institusional yang mengarahkan tindakan individu. Parsons juga mengembangkan empat kebutuhan fungsional sistem yang dikenal dengan skema AGIL, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Adaptasi berkaitan dengan kemampuan sistem menghadapi lingkungan dan mengelola sumber daya, pencapaian tujuan berhubungan dengan penentuan serta pelaksanaan tujuan kolektif, integrasi mengatur hubungan antarkomponen, sedangkan latensi berkaitan dengan pemeliharaan nilai dan pola budaya yang mendukung keberlangsungan sistem.

Skema AGIL memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan mekanisme yang saling melengkapi agar dapat mempertahankan keberadaannya. Sistem ekonomi, misalnya, berperan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya, sistem politik mengatur pencapaian tujuan kolektif, norma dan hukum menjaga integrasi, sedangkan keluarga dan pendidikan berperan dalam pewarisan nilai serta pembentukan kepribadian. Kelebihan teori Parsons terletak pada kemampuannya menjelaskan

keterkaitan antarlembaga dan pentingnya nilai bersama dalam membangun keteraturan masyarakat. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena penekanannya pada keseimbangan dan integrasi dapat mengurangi perhatian terhadap konflik, dominasi, ketimpangan, dan perubahan sosial yang berlangsung melalui pertentangan kepentingan. Oleh karena itu, teori struktural fungsional lebih tepat digunakan untuk menjelaskan mekanisme keteraturan, tetapi perlu dilengkapi perspektif lain untuk memahami ketegangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

b. Teori Sistem Sosial Niklas Luhmann

Luhmann (1995) mengembangkan teori sistem sosial dengan menempatkan komunikasi sebagai unsur utama pembentuk dan reproduksi sistem sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu yang melakukan interaksi, melainkan sistem komunikasi yang terus menghasilkan komunikasi berikutnya. Individu sebagai manusia tidak identik dengan sistem sosial, tetapi berhubungan dengannya melalui proses komunikasi. Pandangan ini memperluas pemahaman mengenai masyarakat karena keberlangsungan sistem tidak hanya ditentukan oleh struktur dan fungsi lembaga, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi mempertahankan hubungan sosial. Komunikasi memungkinkan masyarakat membentuk makna, menghasilkan keputusan, menyebarkan pengetahuan, dan merespons perubahan lingkungan.

Salah satu konsep penting dalam teori Luhmann adalah diferensiasi sosial, yaitu proses berkembangnya berbagai subsistem dalam masyarakat modern yang memiliki fungsi dan mekanisme komunikasi masing-masing. Sistem ekonomi beroperasi melalui komunikasi mengenai pembayaran, sistem politik berkaitan dengan kekuasaan dan keputusan kolektif, sistem hukum berhubungan dengan pembedaan antara yang legal dan ilegal, sedangkan sistem pendidikan menjalankan komunikasi mengenai pembelajaran dan pengetahuan. Meskipun memiliki mekanisme berbeda, subsistem tersebut saling berhubungan dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Guedes dan Vinhas (2021) menunjukkan relevansi teori Luhmann dalam memahami hubungan antara kompleksitas, kognisi, dan pembentukan pengetahuan. Sementara itu, Taekke (2022) mengembangkan perspektif diferensiasi sosial dengan memperhatikan pengaruh media digital dan algoritma terhadap perubahan struktur komunikasi masyarakat. Dengan demikian, teori Luhmann memiliki keunggulan dalam menjelaskan kompleksitas dan perubahan masyarakat modern, meskipun konsepnya yang abstrak memerlukan pengaitan dengan fenomena sosial konkret agar lebih mudah digunakan dalam analisis empiris.

c. Teori Fakta Sosial Émile Durkheim

Durkheim (1982) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki fakta sosial berupa cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu serta memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku manusia. Fakta sosial dapat ditemukan dalam nilai, norma, hukum, kebiasaan, tradisi, dan institusi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan fakta sosial menunjukkan bahwa individu hidup dalam lingkungan yang telah memiliki aturan kolektif sebelum dirinya terlibat dalam hubungan sosial. Aturan tersebut memberikan batasan sekaligus pedoman bagi individu dalam menjalankan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, masyarakat dapat mempertahankan keteraturannya karena anggota masyarakat memiliki orientasi terhadap aturan dan nilai yang berlaku.

Konsep solidaritas sosial juga menjadi bagian penting dalam pemikiran Durkheim. Ia membedakan solidaritas mekanik yang didasarkan pada kesamaan nilai,

kepercayaan, dan pola kehidupan dengan solidaritas organik yang terbentuk melalui pembagian kerja dan ketergantungan antaranggotanya. Solidaritas mekanik umumnya ditemukan dalam masyarakat dengan pembagian kerja yang relatif sederhana, sedangkan solidaritas organik berkembang dalam masyarakat modern yang memiliki diferensiasi pekerjaan dan fungsi sosial. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi masyarakat tidak selalu harus dibangun melalui keseragaman, tetapi juga dapat terbentuk melalui hubungan saling membutuhkan. Kekuatan teori Durkheim terletak pada penjelasannya mengenai peran nilai kolektif, norma, dan solidaritas dalam menjaga keteraturan sosial. Namun, pendekatannya relatif kurang memberikan perhatian terhadap makna subjektif tindakan individu dan proses komunikasi sebagai mekanisme reproduksi sistem sosial.

d. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Weber (1978) memandang masyarakat melalui tindakan sosial, yaitu tindakan individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada perilaku orang lain. Perspektif ini menempatkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan memberikan makna terhadap tindakan dan mempertimbangkan respons pihak lain. Weber mengidentifikasi empat bentuk tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional yang sama, tetapi dapat dipengaruhi oleh tujuan, keyakinan, emosi, dan kebiasaan. Melalui konsep tindakan sosial, masyarakat dipahami sebagai hasil hubungan antarmanusia yang berlangsung berdasarkan makna dan orientasi tindakan tertentu.

Teori Weber memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana keteraturan sosial terbentuk melalui tindakan individu yang saling berorientasi. Hubungan antara individu dan institusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur formal, tetapi juga oleh pemahaman, penerimaan, dan tindakan anggota masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Perspektif ini memungkinkan analisis terhadap kepemimpinan, otoritas, birokrasi, kekuasaan, dan perubahan perilaku sosial. Namun, keterbatasannya terletak pada kebutuhan untuk menghubungkan makna subjektif tindakan individu dengan struktur sosial yang lebih luas. Tanpa analisis struktural, penjelasan tindakan sosial berisiko kurang memperhatikan ketimpangan sumber daya dan kekuatan institusi dalam membatasi pilihan individu.

e. Analisis Komparatif Teori Sistem Sosial

Keempat teori tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam menjelaskan masyarakat sebagai sistem sosial. Parsons memberikan penekanan pada fungsi dan keterkaitan antarkomponen dalam mempertahankan keteraturan, sedangkan Luhmann menjelaskan bagaimana komunikasi dan diferensiasi memungkinkan sistem sosial berkembang dalam masyarakat kompleks. Durkheim memberikan dasar pemahaman mengenai kekuatan fakta sosial dan solidaritas kolektif, sementara Weber menekankan makna subjektif dan orientasi tindakan individu dalam membentuk hubungan sosial.

Perbedaan perspektif tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi. Keteraturan sosial membutuhkan nilai dan norma sebagaimana dijelaskan Durkheim, fungsi dan integrasi sebagaimana dikembangkan Parsons, tindakan bermakna sebagaimana dijelaskan Weber, serta komunikasi yang berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Luhmann. Meskipun demikian, masing-masing teori memiliki keterbatasan ketika digunakan secara

terpisah. Struktural fungsional berpotensi mengabaikan konflik dan ketimpangan, teori fakta sosial kurang menekankan makna subjektif individu, teori tindakan sosial membutuhkan penjelasan struktural yang lebih luas, sedangkan teori sistem Luhmann cenderung abstrak dalam menjelaskan pengalaman konkret individu.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai sistem sosial lebih tepat dipahami melalui sintesis keempat perspektif tersebut. Struktur sosial memberikan kerangka hubungan, nilai dan norma membangun orientasi kolektif, tindakan individu mereproduksi hubungan sosial, sedangkan komunikasi memungkinkan sistem mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Sintesis ini menghasilkan pemahaman bahwa masyarakat bukan sistem yang sepenuhnya harmonis maupun statis, melainkan kesatuan sosial yang terus mengalami proses integrasi, negosiasi, konflik, dan perubahan.

4. Mekanisme Kerja dan Integrasi Sistem Sosial

Mekanisme kerja sistem sosial menunjukkan bagaimana berbagai unsur masyarakat saling berhubungan dalam mempertahankan keteraturan dan keberlangsungan kehidupan bersama. Salah satu mekanisme utamanya adalah interaksi dan komunikasi sosial. Interaksi memungkinkan individu dan kelompok membangun hubungan timbal balik, sedangkan komunikasi menjadi sarana penyampaian informasi, nilai, kepentingan, dan makna. Melalui komunikasi, masyarakat dapat membentuk kesepakatan, menyelesaikan persoalan, mengoordinasikan aktivitas, serta mempertahankan hubungan sosial. Luhmann (1995) menempatkan komunikasi sebagai operasi utama sistem sosial karena setiap komunikasi dapat menjadi dasar bagi berlangsungnya komunikasi berikutnya. Dalam masyarakat modern, mekanisme tersebut berlangsung melalui komunikasi langsung, organisasi, media massa, dan platform digital yang memperluas jangkauan hubungan sosial.

Mekanisme berikutnya adalah sosialisasi dan internalisasi nilai. Sosialisasi merupakan proses ketika individu mempelajari nilai, norma, pengetahuan, dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini berlangsung melalui keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, lingkungan kerja, lembaga keagamaan, dan media. Melalui sosialisasi, individu memahami status dan perannya serta belajar menyesuaikan perilaku dengan harapan sosial. Internalisasi terjadi ketika nilai dan norma tidak hanya diketahui, tetapi menjadi bagian dari orientasi dan kesadaran individu dalam bertindak. Parsons (1951) menempatkan internalisasi nilai sebagai unsur penting dalam mempertahankan pola budaya dan integrasi sistem sosial. Dengan demikian, keberlangsungan masyarakat tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada proses pembentukan kesadaran individu terhadap nilai yang dianut bersama.

Pengendalian sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menjaga kesesuaian perilaku dengan nilai dan norma yang berlaku. Pengendalian tersebut dapat berlangsung secara formal melalui hukum, peraturan, dan sanksi kelembagaan, maupun secara informal melalui teguran, nasihat, pengawasan sosial, dan tekanan kelompok. Durkheim (1982) menjelaskan bahwa fakta sosial memiliki kekuatan mengatur perilaku individu sehingga kehidupan bersama tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak personal. Pengendalian sosial diperlukan untuk mengurangi penyimpangan, menjaga kepercayaan, dan menyelesaikan pelanggaran terhadap aturan bersama. Namun, efektivitas pengendalian sosial juga bergantung pada legitimasi institusi dan keadilan penerapan aturan. Pengendalian yang dilakukan secara tidak adil justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan memperbesar konflik dalam masyarakat.

Solidaritas dan integrasi sosial merupakan mekanisme yang menghubungkan berbagai kelompok dengan kepentingan dan latar belakang berbeda. Solidaritas terbentuk melalui kesadaran akan keterikatan, kepentingan bersama, dan ketergantungan antaranggotanya. Durkheim (1982) menjelaskan bahwa solidaritas dapat berkembang melalui kesamaan nilai maupun pembagian kerja yang menciptakan hubungan saling membutuhkan. Dalam masyarakat modern, integrasi tidak selalu menuntut keseragaman, tetapi memerlukan pengakuan terhadap perbedaan dan kesediaan membangun kerja sama. MacIsaac et al. (2023) menempatkan hubungan sosial, solidaritas, dan kepercayaan sebagai dimensi penting dalam memahami kohesi sosial. Sementara itu, Aruqaj (2023) menekankan perlunya pendekatan multidimensional untuk memahami kohesi sosial dengan mempertimbangkan hubungan antara institusi, ketimpangan, dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kedekatan hubungan, tetapi juga oleh kualitas institusi dan kesempatan yang tersedia bagi masyarakat.

Mekanisme sistem sosial juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi berkaitan dengan kemampuan individu, kelompok, dan institusi menyesuaikan pola hubungan, pembagian peran, serta penggunaan sumber daya ketika menghadapi perubahan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dalam kerangka AGIL, Parsons (1951) menempatkan adaptasi sebagai salah satu kebutuhan fungsional sistem untuk menghadapi tuntutan lingkungan. Masyarakat yang mampu beradaptasi dapat mengembangkan pola kerja baru, memperbarui kelembagaan, dan menyesuaikan nilai sosial tanpa harus kehilangan seluruh identitas kolektifnya. Namun, proses adaptasi juga dapat menghasilkan ketegangan apabila perubahan berlangsung lebih cepat daripada kemampuan institusi dan anggota masyarakat dalam menyesuaikan diri. Dengan demikian, keberlanjutan sistem sosial membutuhkan keseimbangan antara pemeliharaan nilai, integrasi, dan kemampuan menghadapi perubahan.

5. Dinamika dan Perubahan Sistem Sosial

Masyarakat sebagai sistem sosial tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami perubahan seiring perkembangan ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Dinamika sosial menunjukkan adanya perubahan dalam pola hubungan, struktur kelembagaan, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut dapat berlangsung secara bertahap maupun cepat, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pertumbuhan penduduk, konflik sosial, perubahan pola pikir, dan perkembangan kebutuhan masyarakat, sedangkan faktor eksternal mencakup globalisasi, modernisasi, perkembangan teknologi, dan hubungan antarnegara. Dalam perspektif sistem sosial, perubahan pada satu unsur dapat memengaruhi unsur lainnya karena setiap komponen memiliki keterkaitan fungsional. Oleh sebab itu, dinamika masyarakat perlu dipahami sebagai proses perubahan yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan sosial secara bersamaan.

Modernisasi dan globalisasi menjadi faktor penting yang mendorong perubahan sistem sosial. Modernisasi berkaitan dengan perubahan pola kehidupan masyarakat menuju penggunaan pengetahuan, teknologi, rasionalitas, dan pembagian kerja yang semakin kompleks. Sementara itu, globalisasi memperluas hubungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya melampaui batas geografis suatu negara. Perkembangan tersebut menyebabkan masyarakat semakin terhubung melalui arus informasi, perdagangan, mobilitas manusia, dan pertukaran budaya. Dalam perspektif Luhmann (1995), perkembangan masyarakat modern ditandai oleh diferensiasi berbagai subsistem

yang memiliki fungsi dan mekanisme komunikasi berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat menangani kompleksitas kehidupan melalui spesialisasi fungsi, tetapi juga meningkatkan ketergantungan antarsistem. Perubahan dalam ekonomi global, misalnya, dapat memengaruhi kebijakan politik, sistem pendidikan, kesempatan kerja, dan hubungan sosial masyarakat.

Modernisasi dan globalisasi juga mendorong perubahan struktur dan lembaga sosial. Perubahan pola pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat memperlihatkan bahwa institusi sosial harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru. Keluarga, misalnya, mengalami perubahan dalam pembagian peran, pola pengasuhan, dan hubungan antaranggota akibat meningkatnya mobilitas pekerjaan dan perkembangan teknologi komunikasi. Lembaga pendidikan juga menghadapi perubahan melalui penggunaan pembelajaran digital, sumber belajar terbuka, dan pola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Demikian pula, lembaga ekonomi mengalami transformasi melalui perdagangan elektronik, pekerjaan berbasis platform, dan perkembangan sistem pembayaran digital. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa institusi sosial bukan struktur yang sepenuhnya tetap, melainkan organisasi hubungan yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Konflik dan ketimpangan sosial juga menjadi bagian penting dalam dinamika sistem sosial. Konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, identitas, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya. Dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial, kelompok tertentu dapat memperoleh kesempatan lebih besar dibandingkan kelompok lainnya dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan tersebut berpotensi menghambat integrasi karena menghasilkan perbedaan pengalaman dan kepentingan antarkelompok. Berbeda dari pandangan struktural fungsional yang menekankan keseimbangan sistem, analisis konflik memperlihatkan bahwa perubahan sosial juga dapat berlangsung melalui pertentangan terhadap struktur yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, konflik tidak selalu menunjukkan kegagalan sistem sosial, tetapi dapat menjadi mekanisme yang mendorong perubahan institusi, distribusi kekuasaan, dan pembentukan aturan baru.

Transformasi nilai dan budaya merupakan dimensi lain dalam perubahan sistem sosial. Perkembangan pendidikan, mobilitas penduduk, komunikasi lintas budaya, dan globalisasi memungkinkan masyarakat menerima berbagai nilai dan pola kehidupan baru. Nilai tradisional yang sebelumnya menjadi pedoman utama dapat mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan nilai modern seperti individualitas, kesetaraan, profesionalisme, dan keterbukaan informasi. Perubahan tersebut tidak selalu menyebabkan hilangnya kebudayaan lokal, tetapi dapat menghasilkan proses negosiasi antara tradisi dan modernitas. Dalam konteks ini, kebudayaan berfungsi sebagai sumber identitas sekaligus ruang adaptasi terhadap perubahan. Masyarakat perlu mempertahankan nilai yang mendukung solidaritas dan kehidupan bersama, sekaligus mengembangkan keterbukaan terhadap perubahan yang memberikan manfaat bagi kehidupan sosial.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui pertemuan langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, forum daring, dan berbagai platform digital. Perubahan ini memperluas jaringan sosial serta memungkinkan individu berpartisipasi dalam komunitas tanpa dibatasi oleh jarak geografis. González-Bailón dan Lelkes (2023) menjelaskan bahwa media sosial memiliki konsekuensi yang beragam terhadap kohesi sosial. Platform digital dapat memperluas konektivitas, pertukaran informasi, dan partisipasi sosial, tetapi juga

berpotensi memperkuat polarisasi dan konflik antarkelompok. Sejalan dengan itu, Üblacker et al. (2024), melalui tinjauan sistematis terhadap 52 penelitian empiris, menemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi digital dapat memperkuat kohesi sosial lingkungan melalui pembentukan modal sosial lokal, tetapi manfaatnya tidak merata dan bergantung pada kondisi sosial masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital tidak secara otomatis memperkuat atau melemahkan hubungan sosial, melainkan dampaknya dipengaruhi oleh pola penggunaan, karakteristik pengguna, dan kondisi lingkungan sosial.

Dengan demikian, perubahan teknologi perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi sistem sosial yang memengaruhi hubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Komunikasi digital membuka peluang terbentuknya solidaritas dan kerja sama baru, tetapi juga dapat menghasilkan ketegangan ketika informasi yang beredar tidak terverifikasi atau digunakan untuk memperkuat kepentingan kelompok tertentu. Taekke (2022) menunjukkan bahwa perkembangan media digital dan algoritma memiliki relevansi terhadap perubahan diferensiasi masyarakat. Artinya, perubahan teknologi bukan sekadar perubahan alat komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan perubahan cara masyarakat mengorganisasikan informasi dan hubungan sosial. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat mengelola teknologi secara kritis menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan integrasi dan keberlanjutan sistem sosial.

6. Tantangan Masyarakat sebagai Sistem Sosial Kontempore*r*

Masyarakat kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keteraturan, integrasi, dan kohesi sosial. Perkembangan modernisasi, globalisasi, dan teknologi digital telah memperluas kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru dalam hubungan antarkelompok. Kompleksitas masyarakat modern menyebabkan nilai, kepentingan, dan pola komunikasi semakin beragam. Luhmann (1995) menjelaskan bahwa diferensiasi sistem sosial memungkinkan berkembangnya berbagai subsistem dengan mekanisme komunikasi masing-masing. Namun, kompleksitas tersebut juga menimbulkan tantangan koordinasi karena setiap subsistem memiliki orientasi dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam kondisi demikian, keberlangsungan masyarakat membutuhkan mekanisme komunikasi, kepercayaan, dan integrasi yang mampu menghubungkan berbagai kepentingan sosial.

Salah satu tantangan tersebut adalah berkembangnya individualisme yang berpotensi melemahkan solidaritas sosial. Individualisme berkaitan dengan meningkatnya penekanan terhadap kebebasan, kepentingan, dan pencapaian pribadi dalam kehidupan masyarakat. Pada satu sisi, orientasi individual dapat mendorong kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab personal. Namun, apabila tidak diimbangi dengan kesadaran kolektif, kondisi tersebut dapat mengurangi keterlibatan individu dalam kegiatan bersama, memperlemah kepedulian sosial, dan mengurangi hubungan antarkelompok. Durkheim (1982) menekankan pentingnya solidaritas sebagai dasar keterikatan individu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan masyarakat modern bukan menghilangkan kebebasan individu, melainkan membangun keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab kolektif. Penguatan komunitas, partisipasi sosial, dan kegiatan bersama menjadi penting untuk mempertahankan hubungan sosial di tengah perubahan pola kehidupan.

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya polarisasi dan konflik sosial. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terkelompok berdasarkan perbedaan identitas, pandangan, kepentingan, atau orientasi politik sehingga hubungan antarkelompok menjadi semakin berjarak. Perbedaan yang sebenarnya merupakan bagian wajar dari

kehidupan sosial dapat berkembang menjadi konflik ketika disertai prasangka, stereotip, dan penolakan terhadap kelompok lain. González-Bailón dan Lelkes (2023) menunjukkan bahwa media sosial memiliki hubungan yang kompleks dengan kohesi sosial karena dapat memperluas jaringan hubungan sekaligus menciptakan kondisi yang memperkuat perpecahan. Smith dan Thomas (2025) juga menjelaskan bahwa polarisasi, radikalisasi, dan proses mobilisasi memiliki keterkaitan dengan dinamika pengaruh sosial serta ketahanan demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa polarisasi tidak hanya menjadi persoalan perbedaan pendapat, tetapi dapat memengaruhi kepercayaan sosial, legitimasi institusi, dan kemampuan masyarakat membangun tindakan kolektif.

Disinformasi dalam ruang digital menjadi tantangan serius karena dapat mengganggu kualitas komunikasi dan pembentukan pengetahuan masyarakat. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat memengaruhi persepsi publik, membangun prasangka, dan memperbesar konflik antarkelompok. Dalam perspektif Luhmann (1995), komunikasi merupakan mekanisme utama reproduksi sistem sosial sehingga kualitas informasi memiliki arti penting bagi keberlangsungan hubungan sosial. Ketika komunikasi dipenuhi informasi yang tidak terverifikasi, masyarakat dapat mengalami kesulitan membangun pemahaman bersama. Vadapalli et al. (2026), melalui kajian integratif terhadap 157 publikasi, menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara misinformasi daring, polarisasi ideologis, dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Kajian tersebut menegaskan bahwa ketiga persoalan tersebut dapat saling memperkuat sehingga penanganannya membutuhkan literasi digital, penguatan kualitas informasi, dan peningkatan kepercayaan terhadap institusi publik.

Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi tantangan yang dapat menghambat integrasi masyarakat. Perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, teknologi, dan sumber daya ekonomi menyebabkan sebagian kelompok memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga menyangkut kemampuan individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Aruqaj (2023) menekankan bahwa kohesi sosial perlu dipahami melalui hubungan berbagai dimensi, termasuk ketimpangan, kualitas institusi, dan kesejahteraan. Sementara itu, Üblacker et al. (2024) memperlihatkan bahwa manfaat teknologi digital terhadap kohesi sosial lingkungan juga tidak selalu merata karena dipengaruhi oleh modal sosial dan kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan dapat muncul dalam bentuk kesenjangan ekonomi sekaligus kesenjangan partisipasi sosial dan digital. Apabila tidak ditangani, ketimpangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan memperbesar jarak antarkelompok.

Tantangan terakhir adalah mempertahankan integrasi dan kohesi sosial di tengah semakin kompleksnya kehidupan masyarakat. Integrasi sosial tidak cukup dibangun melalui kesamaan identitas atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi membutuhkan kepercayaan, keadilan, keterbukaan, dan kesempatan yang relatif setara bagi seluruh anggota masyarakat. MacIsaac et al. (2023) menjelaskan bahwa kohesi sosial mencakup dimensi hubungan sosial, solidaritas, dan kepercayaan. Oleh karena itu, penguatan kohesi sosial memerlukan peran lembaga keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintahan dalam membangun hubungan yang inklusif. Pendidikan dapat memperkuat toleransi dan kemampuan berpikir kritis, lembaga keluarga menanamkan nilai tanggung jawab, lembaga keagamaan mengembangkan

kepedulian sosial, sedangkan pemerintah perlu memastikan kebijakan publik berjalan secara adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagai sistem sosial memerlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara keteraturan dan perubahan. Individualisme, polarisasi, disinformasi, dan ketimpangan tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri karena seluruhnya berkaitan dengan kualitas hubungan sosial dan kinerja institusi. Penguatan literasi digital, pemerataan kesempatan, dialog antarkelompok, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kepercayaan terhadap institusi merupakan langkah penting dalam mempertahankan integrasi sosial. Dengan demikian, keberlanjutan sistem sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan struktur yang telah ada, tetapi juga oleh kemampuannya membangun hubungan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan kesatuan yang terbentuk melalui hubungan timbal balik antara individu, kelompok, nilai, norma, status, peran, lembaga, struktur, dan kebudayaan. Setiap unsur memiliki fungsi dan keterkaitan yang saling memengaruhi dalam membangun keteraturan serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan bersama. Interaksi dan komunikasi sosial menjadi dasar terbentuknya hubungan antarkomponen, sedangkan sosialisasi, internalisasi nilai, pengendalian sosial, solidaritas, dan integrasi berperan dalam menjaga kesinambungan sistem. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat dipahami sekadar sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai jaringan hubungan sosial yang terorganisasi dan terus mengalami perkembangan.

Perspektif Durkheim, Weber, Parsons, dan Luhmann memberikan pemahaman yang saling melengkapi dalam menjelaskan masyarakat sebagai sistem sosial. Durkheim menekankan kekuatan fakta sosial dan solidaritas dalam membangun keteraturan, Weber menjelaskan pentingnya makna subjektif tindakan individu, Parsons menguraikan hubungan fungsional antarkomponen dalam mempertahankan sistem, sedangkan Luhmann menempatkan komunikasi dan diferensiasi sebagai mekanisme reproduksi sistem sosial. Sintesis keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh struktur dan fungsi kelembagaan, tetapi juga oleh tindakan individu, kesadaran kolektif, serta komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam masyarakat kontemporer, modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur kelembagaan, pola interaksi, orientasi nilai, dan hubungan antarkelompok. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan berupa individualisme, polarisasi, disinformasi, dan ketimpangan sosial yang berpotensi melemahkan solidaritas serta kohesi sosial. Oleh karena itu, keberlanjutan sistem sosial membutuhkan penguatan literasi digital, pemerataan kesempatan, kepercayaan terhadap institusi, dialog antarkelompok, dan partisipasi masyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang dinamis, sehingga keteraturan dan integrasi perlu dibangun melalui keseimbangan antara kepentingan individu, kebutuhan kolektif, keadilan sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aruqaj, B. (2023). An integrated approach to the conceptualisation and measurement of social cohesion. Social Indicators Research, 168, 227–263. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03110-z

Durkheim, E. (1982). The rules of sociological method (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1895).

González-Bailón, S., & Lelkes, Y. (2023). Do social media undermine social cohesion? A critical review. Social Issues and Policy Review, 17(1), 155–180. https://doi.org/10.1111/sipr.12091

González-Bailón, S., & Lelkes, Y. (2023). Do social media undermine social cohesion? A critical review. Social Issues and Policy Review, 17(1), 155–180. https://doi.org/10.1111/sipr.12091

Guedes, E. R., & Vinhas, O. I. (2021). Complexidade, cognição e conhecimento na teoria sistêmica de Niklas Luhmann. Mediações - Revista de Ciências Sociais, 26(2), 333–350. https://doi.org/10.5433/2176-6665.2021v26n2p333

Laursen, K. B., Harste, G., & Roth, S. (2022). Moral communication observed with social systems theory. An introduction. Kybernetes, 51(5), 1653–1665. https://doi.org/10.1108/K-01-2022-0059

Luhmann, N. (1995). Social systems (J. Bednarz Jr. & D. Baecker, Trans.). Stanford University Press.

MacIsaac, S., Wavrock, D., & Schellenberg, G. (2023). What holds us together? Measuring dimensions of social cohesion in Canada. Social Indicators Research, 169. https://doi.org/10.3233/SJI-230055

Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.

Rodger, J. J. (2022). Luhmann's theory of psychic systems and communication in social work practice. Journal of Social Work, 22(3), 637–654. https://doi.org/10.1177/14680173211008107

Smith, L. G. E., & Thomas, E. F. (2025). A primer on politicization, polarization, radicalization, and activation and their implications for democracy in times of rapid technological change. British Journal of Social Psychology. https://doi.org/10.1111/bjso.12903

Taekke, J. (2022). Algorithmic differentiation of society – A Luhmann perspective on the societal impact of digital media. Journal of Sociocybernetics, 18(1), 2–23. https://doi.org/10.26754/ojs_jos/jos.202216225

Üblacker, J., Liebig, S., & Hamad, H. (2024). Catalysts of connection. The role of digital information and communication technology in fostering neighbourhood social cohesion: A systematic review of empirical findings. Urban Studies. https://doi.org/10.1177/00420980241281502

Vadapalli, S. K., Doyal, S., Vanheusden, F. J., Binder, J. F., et al. (2026). Exploring the impact of online misinformation on ideological polarisation and institutional distrust: An integrative review and strategic framework for counteraction. SN Social Sciences, 6, Article 87. https://doi.org/10.1007/s43545-026-01349-0

Van Kempen, A. V., & Feldpausch-Parker, A. M. (2024). Communicating science addressing contentious environmental issues: Utilizing Luhmann's social systems theory. Frontiers in Communication, 9. https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1348078

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.